

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 9 Issue 2 Year 2024 Page 15-30

ESKALASI KONFLIK CHINA-TAIWAN DALAM PERSPEKTIF REALISME OFENSIF: DINAMIKA PENAMBAHAN KAPABILITAS MILITER CHINA SEBAGAI RESPONS TERHADAP KERJASAMA TAIWAN-AMERIKA SERIKAT

Rahma Azizah¹, dan Mayza Ariella Nurandriyanti²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

muhammad18034@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Konflik China-Taiwan telah menjadi salah satu isu utama dalam geopolitik Asia Timur sejak lama yang melibatkan kepentingan global. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara Taiwan berupaya mempertahankan otonomi dengan dukungan Amerika Serikat. Ketegangan meningkat, ditandai dengan persaingan militer, di mana China memperkuat kemampuan militernya untuk menanggapi pengaruh AS di Taiwan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eskalasi konflik China-Taiwan dalam perspektif Realisme Ofensif, dengan fokus pada dinamika peningkatan kapabilitas militer China. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif, dengan menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, Buku, dan artikel terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas militer China mencerminkan prinsip Realisme Ofensif. China menganggap kerjasama strategis antara Taiwan dan Amerika Serikat, sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan wilayahnya. Sebagai respons, China memperkuat postur militernya untuk mengimbangi dan mengantisipasi potensi ancaman eksternal.

Kata Kunci: Realisme Ofensif, Militer, Kerjasama

Abstract

The China-Taiwan conflict has been one of the major issues in East Asian geopolitics for a long time, involving global interests. China claims Taiwan as part of its territory, while Taiwan seeks to maintain autonomy with the support of the United States. Tensions have increased, characterized by military rivalry, with China strengthening its military capabilities in response to US influence in Taiwan. This research aims to analyze the escalation of the China-Taiwan conflict in the perspective of Offensive Realism, focusing on the dynamics of China's increasing military capabilities. This research uses a literature study method which is part of a qualitative approach, by analyzing various secondary sources such as scientific journals, books, and related articles. This research shows that the increase in China's military capabilities reflects the principle of Offensive Realism. China considers strategic cooperation between Taiwan and the United States, as a threat to its national interests and territorial sovereignty. In response, China strengthens its military posture to compensate and anticipate potential external threats.

Keywords: Offensive Realism, Military, cooperation

PENGANTAR

Hubungan internasional tidak hanya mencakup interaksi dan kerja sama antarnegara, tetapi juga seringkali melibatkan dinamika konflik antar bernegara. Asia Timur, sebagai salah satu kawasan geopolitik paling strategis di dunia yang mencerminkan kompleksitas. Kawasan ini dipengaruhi oleh kekuatan besar seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN, yang memainkan peran signifikan dalam membentuk arah politik, ekonomi, dan keamanan global. China, sebagai aktor utama, memiliki pengaruh besar di berbagai aspek tersebut, sehingga konflik antarnegara di Asia Timur menjadi isu krusial yang tak terelakkan. Salah satu konflik yang paling menonjol adalah antara China dan Taiwan, yang berkembang menjadi salah satu isu strategis global paling rumit, dengan implikasi yang luas terhadap stabilitas kawasan dan dunia.

Konflik antara China dan Taiwan Berawal sejak April 1927 dan konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang, yang berawal dari perang saudara di China pada awal abad ke-20. Pada masa itu, dua kekuatan utama, yakni Partai Nasionalis China (Kuomintang, KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis China (PKC) di bawah Mao Zedong, saling berebut kekuasaan. Setelah kalah dalam perang tersebut pada tahun 1949, KMT mundur ke Pulau Taiwan dan mendirikan pemerintahan yang menamai dirinya Republik China (ROC). Sementara itu, Partai Komunis mendirikan Republik Rakyat China (RRC) di daratan. Sejak itu, Taiwan berkembang sebagai entitas politik tersendiri dengan pemerintah, konstitusi, serta sistem ekonomi dan militer yang terpisah, meski tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. China tetap mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya yang membangkang dan menyatakan keinginannya untuk menyatukan pulau tersebut dengan daratan, bahkan dengan ancaman penggunaan kekuatan militer jika Taiwan mencoba memproklamasikan kemerdekaannya secara resmi. Sementara itu, banyak warga Taiwan melihat pulau mereka sebagai negara yang merdeka de facto, meskipun hanya sedikit negara yang mengakui Taiwan secara resmi di kancah internasional. Dukungan militer dari AS dan negara-negara lainnya kepada Taiwan telah memperumit hubungan dengan China. Dalam beberapa dekade terakhir, ketegangan antara kedua belah pihak berfluktuasi, dengan China terus meningkatkan tekanan diplomatik dan militer, sementara Taiwan berupaya memperkuat hubungan internasionalnya. Konflik ini tetap menjadi sumber ketegangan besar di Asia Timur dengan implikasi global, terutama terkait dengan peran Amerika Serikat.

Respons dan sikap Amerika Serikat terhadap konflik China-Taiwan tetap tidak berubah sejak mantan Presiden Donald Trump dan Presiden saat ini Joe Biden yang terus mendukung Taiwan. Hal ini menimbulkan reaksi negatif oleh pihak China. Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan tugas menyatukan kembali Taiwan dan China akan dilaksanakan secara damai. Pernyataan Zhang Jun didukung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin yang menekankan bahwa kedaulatan China atas Taiwan adalah suatu hal yang tidak bisa dikompromikan. Urusan Taiwan adalah urusan China, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pihak asing, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, sekalipun itu dari AS bersama sekutu-sekutunya. Namun pada tahun 2020, Donald Trump menyetujui proyek penjualan

senjata ke Taiwan senilai \$5,1 miliar atau sekitar Rp 76,5 triliun, dan kebijakan ini masih dipertahankan oleh Joe Biden. Joe Biden juga diam-diam mengirimkan beberapa pasukan, termasuk anggota Angkatan Laut dan Pasukan Khusus AS ke Taiwan untuk pelatihan bersama. Sekitar 26 tentara AS dan pasukan pendukung dilatih dengan angkatan darat Taiwan, dan angkatan laut dilatih di kapal pelatihan kecil. Hal ini sebenarnya menunjukkan hubungan AS-Taiwan baik. Sekali lagi, dukungan AS terhadap Taiwan tidak terlepas dari AS yang terus menerapkan kebijakan Taiwan Relations Act, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan.

Dalam memahami dinamika konflik ini, teori realisme memberikan kerangka teori yang relevan. Teori ini sangat mempengaruhi hubungan internasional sehingga dianggap sebagai teori mapan. Sumber perspektif realisme pertama kali ditemukan pada tahun 403–404 SM selama Perang Peloponnesos yang terkenal, yang ditulis oleh Thucydides (Antunes dan Camiso), tetapi seperti kebanyakan teori, realisme mengandung asumsi. Pertama dan terpenting, negara memainkan peran penting dalam hubungan internasional, Kedua, realisme berpendapat bahwa sistem internasional bersifat anarki di mana tidak ada kekuatan tertinggi selain negara itu sendiri. Di tengah sistem internasional anarki ini, setiap negara dihadapkan pada state of survival, di mana setiap negara berusaha untuk mencapai kepentingannya sendiri. Ketiga, realisme berpendapat bahwa sifat manusia egois dan akan melakukan apa pun untuk mencapai kepentingannya, seperti memperoleh kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, kepentingan nasional suatu negara menjadi sesuatu yang benar-benar penting, dan setiap individu akan berjuang untuk menjaga eksistensinya dalam struktur internasional.

Realisme ofensif adalah salah satu pendekatan dalam teori hubungan internasional yang menekankan bahwa negara-negara cenderung mencari kekuasaan dan keamanan dengan cara mengoptimalkan kekuatan militer dan politik mereka. Realisme ofensif diterapkan China dalam konflik China - Taiwan ini, China percaya bahwa dominasi militer di kawasan Asia-Pasifik, terutama di Selat Taiwan, akan mengurangi pengaruh negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, yang mendukung Taiwan. Dalam pandangan ini, China berusaha untuk menerapkan realisme ofensif agar dominasi kekuatan militernya tidak imbalance dengan Taiwan yang didukung oleh Amerika Serikat. Dalam pendekatan realisme ofensif, kekuatan militer adalah alat utama untuk mencapai tujuan politik. China telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan memperkuat kemampuan militernya, termasuk pengembangan kapal induk dan sistem rudal, untuk menyiapkan kemungkinan intervensi militer jika diperlukan. Selain kekuatan militer, China juga berupaya untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi. China berusaha mengisolasi Taiwan secara internasional dengan menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara lain, serta mengklaim bahwa dukungan terhadap Taiwan adalah dukungan terhadap separatisme.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi mengenai konflik China-Taiwan dari perspektif realisme ofensif, masih minim literatur yang secara spesifik membahas hal ini. Namun, terdapat jurnal yang ditulis oleh Sita Hidrayah yang mengkaji “konflik antara China dan Taiwan serta respons Amerika Serikat”. Jurnal tersebut lebih berfokus pada ketegangan yang terjadi

dalam konflik ini serta bantuan Amerika Serikat seperti bantuan militer serta penjualan senjata kepada Taiwan. Amerika Serikat (AS), sebagai pesaing China dan negara yang memiliki kepentingan di Asia-Pasifik, memandang isu Taiwan tidak hanya sebagai masalah internal China semata, melainkan juga dalam konteks kepentingan AS di kawasan tersebut, termasuk aspek ekonomi. Oleh karena itu, dari sudut pandang AS, demi melindungi kepentingannya, AS merasa perlu terlibat dalam persoalan Taiwan dan China. Sebaliknya, China terus berusaha menjaga agar isu Taiwan tetap dianggap sebagai urusan domestik dan menegaskan bahwa masalah Taiwan adalah masalah internal negaranya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, Kenepri, dan Muthia Darma membahas “strategi balance of power yang diterapkan Taiwan dalam merespons upaya reunifikasi oleh China”. Dalam jurnal ini, para penulis menyoroti strategi balancing Taiwan terhadap China, Untuk melindungi Taiwan dari rencana reunifikasi dan potensi ancaman terhadap China. Taiwan melakukan dua jenis pemerataan yaitu balancing eksternal dan balancing internal. balancing eksternal mengacu pada respons terhadap ancaman eksternal melalui penggunaan sumber daya eksternal, seperti memperkuat dan memperluas aliansi yang ada untuk bersaing dengan negara-negara dominan atau yang mengancam. Strategi balancing eksternal yang dilakukan oleh Taiwan melibatkan pembentukan aliansi dengan Amerika Serikat. Hubungan baik antara Taiwan dan Amerika Serikat tercermin dalam berbagai perjanjian, seperti Mutual Defense Treaty (MDT) dan Taiwan Relations Act (TRA). Kedua negara sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan melalui MDT untuk menghadapi kemungkinan ancaman di kawasan Pasifik Barat, terutama dari China. Taiwan secara khusus juga melakukan peningkatan anggaran untuk memperkuat kemampuan militer, termasuk pembelian persenjataan dari Amerika Serikat senilai \$1,1 miliar. Taiwan juga berfokus pada kesiapan tempur melalui perbaikan sistem pertahanan operasional, penyesuaian formasi serta sumber daya militer, dan pengajuan tambahan pendanaan.

Berikutnya ialah sebuah penelitian yang mengkaji konflik antara China dan Taiwan melalui perspektif teori Hubungan Internasional, khususnya teori Realisme. Penelitian yang berjudul "A Conflict Between China and Taiwan: An Analysis from a Realism Perspective", dengan penulis Halda Nuriyya dan Badrus Sholeh, sudah sesuai dengan topik yang dibahas. Namun, penelitian tersebut menguraikan konflik China - Taiwan dari sudut pandang teori Realisme secara umum, Realisme memandang bahwa dalam konteks internasional, setiap negara selalu bersaing dan berpotensi menimbulkan konflik. Ini disebabkan oleh sifat manusia yang egois dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Situasi internasional digambarkan sebagai perjuangan untuk bertahan hidup, di mana kekuatan menjadi sangat penting. Setiap negara berusaha untuk membangun kekuatan dari berbagai aspek, seperti militer, politik, dan ekonomi. Konflik yang terjadi antara China dan Taiwan mencerminkan kepentingan masing-masing dalam mempertahankan kedaulatan. Dalam konflik ini,

Taiwan menghadapi ancaman dari kekuatan besar Tiongkok di kancah politik internasional, yang menghambat upayanya untuk diakui sebagai negara yang utuh oleh negara lain. Oleh karena itu, Taiwan hanya dapat mempertahankan status quo saat ini. Penulis juga tidak mempersempit pembahasan kepada perspektif Realisme Ofensif. Selain itu, penelitian ini juga menelaah strategi yang diadopsi oleh Taiwan dan China, serta dukungan diplomatik yang diterima oleh Taiwan.

Terdapat penelitian yang membahas mengenai konflik China-Taiwan secara umum, serta membahas intervensi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, khususnya terhadap Taiwan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Cina-Taiwan disebabkan oleh kebangkitan China dalam bidang ekonomi dan militer, yang meningkatkan kekhawatiran serta ancaman, terutama bagi sekutu-sekutu AS, seperti Taiwan. Sebagai sekutu lama, Taiwan memiliki peran penting bagi AS. Sikap AS terhadap konflik ini cenderung ambigu, terlihat dari persetujuan Joint Communiqué dengan China pada tahun 1979, namun juga membuat Taiwan Relations Act (TRA) dengan Taiwan. Taiwan memiliki nilai strategis di mata AS, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. Dari sisi ekonomi, Taiwan merupakan salah satu importir senjata terbesar dari AS. Dalam ranah politik, Taiwan menunjukkan dukungan terhadap Barat. Faktor ini mendorong AS untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik, agar sekutu-sekutunya tidak jatuh ke tangan komunis. Di aspek militer, AS membangun pangkalan di Taiwan untuk "memperingatkan" China dan Rusia agar tidak mengganggu sekutu-sekutunya di wilayah Asia Pasifik. Penelitian ini dikemukakan oleh Syahbuddin dengan judul "Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan".

Kemudian terdapat penelitian yang membahas keamanan Taiwan dalam menghadapi ancaman dari China. Jurnal yang berjudul "Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China" membahas bahwasannya konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut terdapat aktor lain yang turut membantu dalam konflik ini, seperti Amerika Serikat yang membantu Taiwan dalam menghadapi China. Dengan adanya Amerika Serikat yang menjadi bala bantuan untuk Taiwan membuat China tertahan untuk melakukan serangan militer terhadap Taiwan. Dikarenakan Amerika Serikat merupakan salah satu peringkat teratas dalam bidang militer, sehingga China merasa segan untuk berhadapan dengan Amerika Serikat. Dibawah naungan Amerika Serikat, membuat Taiwan semakin meningkatkan keimanannya dengan membeli pasokan alutista dari Amerika Serikat. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat sebuah teori Realisme Defensif yang dimana Taiwan membuat pertahanan keamanan dari serangan China dengan mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, dari hasil tinjauan literatur yang telah disampaikan, kajian yang ada hanya terbatas pada perspektif Taiwan dan Amerika Serikat saja, seperti konflik China - Taiwan secara umum, strategi balancing taiwan terhadap China dan keikutsertaan Amerika Serikat dalam konflik China - Taiwan dan bantuan Amerika

Serikat terhadap Taiwan. Dari Penelitian tersebut Tidak ditemukan pembahasan yang komprehensif dari sudut pandang China, khususnya terkait dengan konsep realisme ofensif yang menjadi dasar kebijakan peningkatan kekuatan militer China. Literatur yang ada belum mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana China secara strategis meningkatkan kekuatan militernya hingga berpotensi melampaui kekuatan militer Amerika Serikat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penelitian yang ada, di mana belum ada studi yang secara mendalam mengkaji dampak dari pertumbuhan kekuatan militer China terhadap dinamika geopolitik dan keseimbangan kekuatan di kawasan, khususnya dalam konteks hubungan trilateral antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat.

METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode studi literatur, yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Menurut Rosyidhana (2014: 3) dalam Rusmawan (2019: 104), studi literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menelaah sumber tertulis seperti buku atau literatur yang berkaitan dengan teori dasar. Ini juga mencakup pengumpulan data dan informasi melalui eksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber seperti buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Sejarah konflik China-Taiwan

Sejarah panjang dan kompleks antara konflik China dan Taiwan dimulai pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Setelah perang China-Jepang pertama pada tahun 1895, Dinasti Qing China harus menyerahkan Taiwan kepada Jepang melalui Perjanjian Shimonoseki. Jepang menguasai Taiwan selama lima puluh tahun berikutnya, yang menerapkan kebijakan kolonial dan menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi besar.

Kemudian setelah kekalahan Jepang dari Perang Dunia II pada tahun 1945, Taiwan dikembalikan kepada China yang dimana pada saat itu masih diperintah oleh Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Khai-Sek. Namun, China pada saat itu tengah terlibat dalam perang saudara melawan Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah kemenangan PKC dalam perang saudara pada tahun 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat China (RRC) di daratan utama, sementara itu pemerintah China dibawah pimpinan Chiang Khai-Sek melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintah ROC di pulau itu. Dalam situasi ini membuat dua pemerintahan yang saling klaim sebagai pemerintah sah dari seluruh China RRC di daratan maupun ROC di Taiwan. Pada awalnya, banyak negara di dunia mengakui ROC sebagai perwakilan resmi China, namun seiring waktu, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1971 mengalihkan pengakuannya kepada RRC, semakin banyak negara yang hanya mengakui RRC sebagai

China yang sah. Hal ini menjadikan Taiwan membentuk pemerintahan yang terpisah, meskipun China menganggapnya sebagai wilayah yang memberontak dan berkomitmen untuk menyatukan kembali Taiwan dengan daratan (Azzahra & Sholeh, 2022). Perbedaan ideologi juga menjadi salah satu penyebab utama konflik ini. KMT menganggap bahwa mereka merupakan China yang sesungguhnya dan berdaulat dengan paham nasionalismenya. Di sisi lain, China menyatakan bahwa mereka adalah Pemerintah China secara resmi dengan paham sosialisme yang dianggap sesuai dengan karakter masyarakat negara itu.

Upaya dalam penyelesaian konflik antara China dan Taiwan telah dilakukan, seperti dengan dikeluarkannya konsep “one country, two systems” yang ditawarkan oleh China. Namun, usulan ini mendapatkan penolakan dari Taiwan. Konflik ini terus berlanjut, dengan China terus menekankan klaimnya atas Taiwan dan Taiwan terus berjuang untuk kemerdekaannya (Hidriyah, 2021). Kemudian ketegangan antara China dan Taiwan juga dipicu oleh kehadiran Amerika Serikat (AS) di kawasan. AS memiliki kepentingan geostrategis di Asia Timur dan telah memberikan dukungan kepada Taiwan, yang meningkatkan ketegangan dengan China. China telah menunjukkan kekuatan militernya dengan melakukan tindakan provokatif di wilayah udara Taiwan, yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan oleh Taiwan (Muhamad. S. V, 2022). Konflik ini telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade terakhir, dengan Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa China tidak akan ragu untuk memulai peperangan demi mempertahankan Taiwan. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran internasional tentang kemungkinan konflik terbuka antara China dan Taiwan, yang dapat membahayakan keamanan wilayah tersebut.

Peran Amerika Serikat Terhadap Konflik China - Taiwan

Dalam konflik ini, Amerika Serikat memiliki peran andil yang cukup besar dan menjadikan ancaman serius bagi China yang berpengaruh dalam dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Berawal dari berakhirnya Perang Dunia II yang dimana Amerika telah menjalin kerjasama yang erat dengan Taiwan, yang diakui sebagai mitra strategis. Salah satu poin utama dalam kerjasama ini adalah penjualan senjata, yang telah diatur oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan. Melalui undang-undang ini, Amerika Serikat berkomitmen untuk menyediakan Taiwan dengan peralatan militer yang diperlukan untuk mempertahankan diri, termasuk senjata canggih dan sistem pertahanan yang berupa kapal selam. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Amerika Serikat menjual senjata senilai 1,4 miliar dolar AS kepada Taiwan, yang mencakup berbagai sistem persenjataan modern yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan terhadap potensi agresi dari China (Kompas, 2017). Amerika Serikat juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan militer dan pertukaran informasi intelijen, yang bertujuan untuk memperkuat kesiapan militer Taiwan. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan, tetapi juga

berfungsi sebagai sinyal kepada China bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk melindungi sekutunya di kawasan tersebut.

Selain dukungan militer, Amerika Serikat juga terlibat dalam kerjasama ekonomi dengan Taiwan, yang mencakup berbagai aspek seperti perdagangan dan investasi. Hubungan ekonomi yang kuat ini tidak hanya memberikan stabilitas bagi Taiwan, tetapi juga memperkuat posisi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dalam konteks ini, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, terutama setelah pembentukan AUKUS yang melibatkan Australia dan Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meredam pengaruh China yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik (Lestari, 2023).

Namun, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan reaksi China terhadap dukungan tersebut. Meningkatnya aktivitas militer China di sekitar Selat Taiwan mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara besar ini. Amerika Serikat harus menavigasi hubungan yang kompleks ini dengan hati-hati, mengingat bahwa setiap langkah yang diambil dapat memicu reaksi dari China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Oleh karena itu, strategi Amerika Serikat dalam mendukung Taiwan harus mempertimbangkan dinamika geopolitik yang lebih luas dan potensi konsekuensi dari tindakan yang diambil.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga berusaha untuk menjaga hubungan diplomatik dengan China, yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan. Konsep "new type of great power relations" yang diperkenalkan oleh China pada tahun 2009 menunjukkan upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, meskipun isu Taiwan tetap menjadi sumber ketegangan. Dalam hal ini, Amerika Serikat berusaha untuk menyeimbangkan dukungannya terhadap Taiwan dengan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan China dalam isu-isu global lainnya, menciptakan dinamika yang rumit dalam hubungan internasional di Asia Timur.

Perubahan China pasca dinamika kerjasama Taiwan-AS

Dengan adanya dukungan militer dari Amerika Serikat untuk Taiwan ini sering kali memicu ketegangan antara China dan Amerika Serikat, dengan China menganggapnya sebagai intervensi dalam urusan dalam negerinya dan sebagai ancaman terhadap kedaulatannya (Buzan et al., 1998). China merespons dengan meningkatkan anggaran pertahanannya dan mengembangkan strategi militer yang lebih agresif, termasuk kebijakan Blokade Maritim (Maritime Blockade), Opsi Tekanan dan Paksaan Terbatas (Limited Force or Coercive Options), Kampanye Kekuatan Udara dan Rudal (Air and Missile Campaign), dan Invasi Amfibi (Amphibious Invasion) (Dewi, 2019). Keempat strategi tersebut merupakan strategi dari People's Liberation Army (PLA) atau tentara yang dibawah oleh pemerintah China.

Kebijakan yang pertama, yaitu Maritime Blockade yang bertujuan untuk mengontrol akses ke dan dari Taiwan melalui laut, di mana PLA mengancam kapal yang beroperasi di sekitar Taiwan dengan serangan rudal dan penyitaan pulau-pulau lepas pantai, sehingga berusaha mengisolasi Taiwan secara maritim (Fan, 2017). Hal ini dapat dikatakan mudah bagi China karena adanya letak geografis Taiwan yang strategis, terlebih lagi target blokadanya merupakan sebuah pulau ‘kecil’ yang hanya terhubung dari udara dan laut. Kemudian kebijakan kedua, yaitu Limited Force or Coercive Options yang berfokus pada serangan terhadap infrastruktur kritis dan kepemimpinan di Taiwan, dengan tujuan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mereka dan menciptakan ketidakstabilan internal. Kebijakan ketiga, yaitu Amphibious Invasion yang dimana PLA melibatkan kampanye pendaratan amfibi yang dirancang untuk menerobos pertahanan pantai Taiwan, dimana PLA terus meningkatkan kapabilitasnya untuk mengangkut lebih banyak pasukan dan peralatan ke wilayah tersebut. Kebijakan keempat, yaitu Air and Missile Campaign dengan fokus PLA yang menggunakan serangan udara dan rudal balistik untuk menghancurkan target strategis di Taiwan, dengan China yang menunjukkan kemampuannya untuk melancarkan serangan yang cepat dan efektif dengan menggunakan rudal DF-16 yang dapat menyerang Taiwan bahkan dari daya jangkauan antara 1.000 sampai 1.500 km. PLA juga telah melakukan modernisasi persenjataan dan kekuatan militernya (Kompas, 2017).

Selain itu, China juga meningkatkan pengawasan dan tekanan terhadap Taiwan, berusaha membatasi kemampuan pemerintah Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen yang menolak prinsip One China Policy. Perubahan ini mencerminkan kebangkitan China dalam menghadapi tantangan geopolitik dan upaya untuk mempertahankan kedaulatan serta integritas teritorialnya di tengah ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut (Dewi, 2019).

Teori Realisme Ofensif: Kerangka Analisis dalam Konflik Internasional

Dalam studi hubungan internasional, perspektif realisme ofensif yang dikembangkan oleh John Mearsheimer adalah salah satu pendekatan penting untuk memahami konflik dan keamanan global. Menurut teori ini, negara-negara di panggung internasional bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka, dengan dorongan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi dibandingkan negara lain. Realisme ofensif ini merupakan tanggapan Mearsheimer (Mearsheimer, 2001: 268) terhadap teori realisme defensif yang diajukan oleh Kenneth Waltz. Meskipun ada perbedaan di antara keduanya, keduanya tetap bagian dari neorealisme, yang muncul sebagai pendekatan kontemporer dalam studi Hubungan Internasional. Teori realisme ofensif berpendapat bahwa di bawah kondisi anarki (ketiadaan otoritas global yang mengatur negara-negara), tidak ada negara yang bisa benar-benar yakin tentang niat negara lain. Akibatnya, negara-negara cenderung memperkuat kemampuan militer mereka sebagai bentuk pencegahan, hal ini mendorong negara untuk terus meningkatkan kekuatan guna memastikan keamanan mereka. Selain itu, negara-negara digambarkan sebagai

aktor yang selalu berusaha mengubah status quo, karena anarki memaksa mereka untuk memaksimalkan kekuatan demi melindungi diri. (Mearsheimer, 2001). Proses ini tidak akan pernah selesai, karena tidak ada batas yang jelas mengenai seberapa banyak kekuatan yang cukup untuk merasa aman. Hal ini kemudian menimbulkan dilema keamanan, di mana upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya justru membuat negara lain merasa terancam, seperti yang dijelaskan oleh Jervis (1978). Ketegangan ini bisa memicu persaingan dan bahkan konflik antar negara.

Menurut Mearsheimer dalam realisme ofensif, terdapat beberapa poin penting yang bisa disederhanakan. Pertama, sistem internasional itu seperti anarki, artinya tidak ada otoritas tertinggi yang bisa menghukum atau mengatur kebijakan negara. Setiap negara bebas menentukan kebijakan luar negerinya sendiri. Kedua, negara tidak selalu tahu apa niat negara lain dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dan negara tidak bisa yakin bagaimana kekuatan yang dimiliki negara lain. Ketiga, tujuan utama setiap negara di dunia internasional adalah untuk bertahan dengan segala cara. Keempat, negara bertindak secara rasional dan akan memilih tindakan yang paling memungkinkan untuk bertahan. Kelima, setiap negara punya kekuatan yang bisa digunakan untuk mengancam negara lain. Berdasarkan lima poin utama yang disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dasar dari teori realisme ofensif. Kesimpulan ini menyatakan bahwa agar sebuah negara bisa bertahan dalam lingkungan politik internasional, negara tersebut akan menggunakan kekuatannya terhadap negara lain. Sebuah negara baru bisa dianggap benar-benar aman jika sudah menjadi kekuatan paling dominan di wilayahnya, atau dengan kata lain, menjadi hegemon. Namun, karena setiap negara memiliki cara dan kekuatan sendiri untuk bertahan, konflik antar negara menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Dalam konteks militer, pandangan realisme ofensif yang dikemukakan oleh Mearsheimer melihat situasi global saat ini sebagai arena persaingan antar negara besar yang saling berusaha untuk mencapai dominasi dan kekuatan militer yang unggul. Mearsheimer berargumen bahwa setiap negara akan terus berupaya memperkuat kemampuan militer mereka guna melindungi kepentingan nasional serta menjaga posisi strategisnya (Toft, 2005). Salah satu contoh pergolakan militer yang terjadi saat ini adalah ketegangan antara China dan Taiwan, yang mencerminkan logika realisme ofensif sebagaimana dijelaskan oleh Mearsheimer. Dalam konteks ini, China terus memperkuat kapabilitas militernya untuk mencapai dominasi di wilayah Asia-Pasifik, sejalan dengan upaya mempertahankan klaimnya atas Taiwan. Situasi ini diperburuk dengan keterlibatan Amerika Serikat, yang secara aktif mendukung Taiwan melalui penjualan senjata dan peningkatan kerja sama pertahanan.

Analisis Strategi Militer China serta Implementasi Realisme Ofensif dalam Kebijakan Pertahanan Militer China

China memiliki strategi militer yang komprehensif dalam menghadapi Taiwan, terutama ketika Taiwan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat. Strategi-

strategi ini mencakup berbagai opsi, mulai dari blokade maritim (Maritime Blockade), penggunaan kekuatan terbatas atau pemaksaan (Limited Force or Coercive Options), kampanye udara dan misil (Air and Missile Campaign), hingga invasi amfibi (Amphibious Invasion) yang sudah dijelaskan sebelumnya. Strategi ini sejalan dengan implementasi realisme ofensif dalam kebijakan luar negeri China, yang berupaya mempertahankan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia-Pasifik. Dalam konteks ini, Taiwan dipandang sebagai elemen penting yang mempengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Teori realisme ofensif, yang dikemukakan oleh John Mearsheimer, menyatakan bahwa negara-negara besar selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka dalam sistem internasional yang anarki. Dalam kasus China, Taiwan merupakan salah satu "batu loncatan" untuk meningkatkan dominasi strategis di Asia Timur. China memandang pengendalian atas Taiwan sebagai langkah penting untuk memastikan hegemoni regional dan menghalangi intervensi kekuatan asing, terutama Amerika Serikat. Oleh karena itu, China cenderung menggunakan pendekatan ofensif dalam mengelola masalah Taiwan, baik melalui kekuatan militer langsung maupun melalui tekanan ekonomi dan diplomatik.

Alasan utama China menerapkan kebijakan realisme ofensif terhadap Taiwan adalah karena China menganggap Taiwan sebagai ancaman. Taiwan yang terlalu bebas dalam menjalin kerja sama dengan negara lain, khususnya Amerika Serikat, dianggap mengganggu kepentingan China. Hubungan dekat antara Taiwan dan Amerika Serikat menjadi perhatian utama. Amerika Serikat sering bertindak sebagai pelindung Taiwan, terutama dengan memberikan dukungan militer. Dukungan ini membantu Taiwan meningkatkan kekuatan militer dan memperkuat persenjataannya. Selain itu, Amerika Serikat juga menyediakan perlengkapan militer lainnya (Darmawan, 2015). China khawatir bahwa modernisasi militer Taiwan akan membuat negara tersebut lebih percaya diri dan merasa lebih aman. Undang-undang yang mengatur bantuan ini juga meningkatkan potensi persaingan kekuatan antara Taiwan dan China. Jika kekuatan militer Taiwan menjadi lebih kuat dari China, upaya China untuk mengendalikan Taiwan akan menjadi lebih sulit (Ramadhani, 2018). Selain itu, China tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh di bawah pengaruh Amerika Serikat. Intervensi Amerika sering mengganggu usaha China untuk mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Usaha Taiwan untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat semakin memberikan dampak pada eksistensi China. Dalam keamanan pada sektor politik ini, Buzan dkk. mengungkapkan bahwa salah satu ancaman pada sektor ini adalah adanya penolakan pengakuan kedaulatan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Dalam hal ini, Taiwan menolak bahwa negaranya merupakan bagian dari Tiongkok, sehingga Taiwan berusaha keras agar mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai sebuah negara yang berdaulat. Taiwan berusaha keras untuk dapat berpartisipasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hal ini berarti apabila Taiwan mendapat

pengakuan secara internasional sebagai sebuah negara, maka secara langsung dapat mengancam kedaulatan Tiongkok dan kebijakan One China Policy. Dalam sektor ekonomi, Taiwan memiliki potensi yang cukup besar. Tiongkok melihat Taiwan sebagai wilayah yang subur dan menyimpan banyak potensi ekonomi untuk dikembangkan. Perekonomian Taiwan dapat tumbuh dengan pesat pada sektor industri dan perdagangan, karena Taiwan memiliki sumber daya manusia yang memadai. Ekonomi Taiwan sebagian besar didorong oleh manufaktur industri, terutama ekspor, industri permesinan, dan petrokimia (Riewpassa, 2014). Terlihat dalam produk domestik bruto (PDB) Taiwan dari tahun ke tahun. Tidak heran apabila Amerika Serikat dan Tiongkok saling memperkuat pengaruhnya di Taiwan, apalagi terdapat peranan Amerika Serikat dalam perekonomian Taiwan. Sehingga, kehilangan Taiwan akan berpotensi mempengaruhi stabilitas domestik Tiongkok, seperti disampaikan Buzan dkk. bahwa salah satu ancaman pada keamanan dalam sektor ekonomi akan berdampak pada stabilitas domestik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Oleh karena itu, Tiongkok berusaha keras agar Taiwan tetap menjadi bagiannya mengingat perekonomian Taiwan yang semakin kuat. Adanya Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, akan meningkatkan potensi dan perekonomian Tiongkok menjadi lebih kuat dari yang telah dicapai, dimana posisi Tiongkok berada di peringkat kedua setelah Amerika Serikat (Saragih, 2018).

Namun, meskipun China menerapkan realisme ofensif, strategi ini tidak semata-mata berbasis pada agresi terbuka. Kebijakan pertahanan China tetap dibalut oleh retorika diplomasi dan kerja sama internasional. China secara konsisten menekankan bahwa pembangunan militer mereka hanya untuk tujuan pertahanan dan bukan untuk konfrontasi langsung. Namun, di balik retorika tersebut, realisme ofensif mendorong mereka untuk terus memodernisasi militer sebagai alat untuk memperluas kekuatan geopolitik dan menghadapi ancaman eksternal, baik dari AS maupun negara-negara sekutu di kawasan Asia.

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini mengkaji dinamika konflik antara China dan Taiwan melalui perspektif teori Realisme, dengan penekanan pada bagaimana interaksi antara kekuatan militer dan kebijakan luar negeri mempengaruhi stabilitas regional. Dalam konteks ini, Taiwan berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya dengan mengadopsi strategi balancing, baik secara eksternal melalui aliansi dengan Amerika Serikat, maupun secara internal dengan memperkuat kemampuan militernya. Kerjasama yang terjalin antara Taiwan dan Amerika Serikat, termasuk perjanjian seperti Mutual Defense Treaty (MDT) dan Taiwan Relations Act (TRA), mencerminkan upaya Taiwan untuk melindungi diri dari ancaman reunifikasi yang diusulkan oleh China. Namun, peningkatan kekuatan militer Taiwan dan dukungan dari Amerika Serikat juga memicu reaksi dari China, yang berusaha untuk memperkuat posisinya di kawasan tersebut, menciptakan dilema keamanan yang kompleks di mana setiap langkah untuk

meningkatkan keamanan oleh satu pihak dapat menimbulkan ketegangan dan potensi konflik dengan pihak lain.

Lebih jauh lagi, terdapat sorotan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarki, negara-negara beroperasi dengan kepentingan nasional yang egois, dimana kekuatan menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional. Dalam konteks ini, konflik antara China dan Taiwan tidak hanya mencerminkan pertarungan untuk kedaulatan, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika kekuatan yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Taiwan berusaha untuk mempertahankan status quo, tantangan yang dihadapi dari China dan ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat, menciptakan situasi yang tidak stabil dan berpotensi berbahaya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang teori Realisme dan strategi yang diterapkan oleh kedua belah pihak sangat penting untuk menganalisis dan meramalkan perkembangan lebih lanjut dalam konflik ini.

REFERENSI

- Al Syahrin, M. N. (2018). China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 145. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.145-163>
- Azzara, H. N., & Sholeh, B. (2022). A conflict between China and Taiwan: An analysis from a realism perspective. *Journal of Social Studies (JSS)*, 18(2), 229–236. <https://doi.org/10.21831/jss.v18i2.49721>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado, United States of America:
- Darmawan, F. E. (2015). Dampak Kerjasama Militer Amerika Serikat-Taiwan Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Cina. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2, pp. 1-11.
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.
- Fan, B. (2017, April 24). Taiwan's Dilemma: Why a Blockade is Likelier than an Invasion. *Taiwan Sentinel*. Diakses 2 Oktober 2024, dari <https://sentinel.tw/blockade-taiwan-fan/>
- Fatmawati, Kenepri, Muthia Darma. 8 Agustus 2023. "Strategi Balancing Taiwan terhadap Tiongkok dalam Merespon Reunifikasi"
- Jervis, R. (2011, June 13). Cooperation under the security dilemma: World politics. *Cambridge Core*. <https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/abs/cooperation-under-the-security-dilemma/C8907431CCEFEFE762BFCA32F091C526>

- Kompas. (2017, Juni 30). AS Jual Senjata 1,4 Miliar Dollar AS ke Taiwan, China Protes Keras. Internasional Kompas. Diakses 2 Oktober 2024, dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/30/16473421//>
- Lestari, I. D. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat Membantu Taiwan dalam Konflik Wilayah Dengan Tiongkok (2017–2022). *Balcony*, 7(2), 111-123.
- Lobell, S. E. (2017). Structural realism/offensive and defensive realism. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.304>
- Lymne Rienner Publishers., B., Wæver, O. dan Wilde, J. de (1998) *Keamanan: kerangka kerja baru untuk analisis*. Boulder, Colo: Lynne Rienner Pub.
- Mearsheimer, J., 2001. *The tragedy of great power politics*. New York: Norton & Company.
- Ramadhani, F. (2018). Dampak Kerjasama Perdagangan Senjata Amerika Serikat Terhadap Peningkatan Ekonomi Taiwan. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, April, 5.
- Riewpassa. (2014). Pengakuan Amerika Serikat Terhadap China RRC dan China Taiwan. *Hubungan Internasional*, pp. 1-51.
- Saragih, H. P. (2018, Februari 18). 20 Negara dengan PDB Terbesar di Dunia. *CNBC Indonesia*. Diakses 2 Oktober 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180218140126-16>
- Simela Victor Muhamad (2022) konflik china-taiwan dan Implikasinya, Diakses 3 Oktober 2024
- Sita Hidriyah. Oktober 2021. “konflik China-Taiwan dan respons Amerika Serikat” Diakses 2 Oktober 2024
- Syahrudin. (2019). EKSISTENSI Kepentingan Global Amerika Serikat Dalam konflik tiongkok-Taiwan. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 9(2), 70–81. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.211>
- Seil, C. (2024, June 18). Pragmatic offensive realism in the South China Sea. *European Guanxi*. <https://www.europeanguanxi.com/post/pragmatic-offensive-realism-in-the-south-china-sea>
- Toft, P. (2005) 'John J. Mearsheimer: seorang realis ofensif antara geopolitik dan kekuasaan', *Jurnal Hubungan Internasional dan Pembangunan*, doi: 10.1057/palgrave.jird.1800065